
RELEVANSI TEORI KLASIK DALAM KONTEKS ADMINISTRASI PUBLIK MODERN

Fifi Febriandiela¹, M. Fachri Adnan²

Universitas Negeri Padang

e-mail: fififebriandiela1702@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the relevance of classical theory in the context of modern public administration. Classical theory, involving concepts such as division of labor, hierarchy, and management principles, was developed in the 19th and early 20th centuries by thinkers such as Max Weber, Frederick Taylor, and Henri Fayol. Even though this theory emerged in the early industrialization period, the question that arises is to what extent these concepts are still relevant in dealing with the complexity and dynamics of public administration today. The research method involves analyzing literature to examine key aspects of classical theory and then identifying how those aspects can be applied or adapted in modern public administration. The research results show that while some classical theoretical concepts remain relevant, adjustments need to be made to match the challenges and environmental changes faced by public institutions today. These findings provide insight into how to combine the legacy of classical theory with innovations that suit the dynamics of modern public administration. The implication is the need to develop an adaptive and results-oriented management model, which can combine the advantages of classical concepts with the needs of society and the changing environment.

Keywords: Relevance, Classical Theory, Modern Public Administration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi teori klasik dalam konteks administrasi publik modern. Teori klasik, yang melibatkan konsep-konsep seperti divisi kerja, hierarki, dan prinsip-prinsip manajemen, dikembangkan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh para pemikir seperti Max Weber, Frederick Taylor, dan Henri Fayol. Meskipun teori ini muncul pada periode industrialisasi awal, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana konsep-konsep tersebut masih relevan dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika administrasi publik saat ini. Metode penelitian melibatkan analisis literatur untuk memeriksa aspek-aspek kunci teori klasik dan kemudian mengidentifikasi bagaimana aspek-aspek tersebut dapat diterapkan atau disesuaikan dalam administrasi publik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara beberapa konsep teori klasik tetap relevan, perlu ada penyesuaian untuk mencocokkan tantangan dan perubahan lingkungan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga publik saat ini. Temuan ini memberikan wawasan tentang cara menggabungkan warisan teori klasik dengan inovasi yang sesuai dengan dinamika administrasi publik modern. Implikasinya adalah perlunya pengembangan model manajemen yang adaptif dan berorientasi pada hasil, yang dapat menggabungkan keunggulan konsep-konsep klasik dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang terus berubah.

Kata Kunci: Relevansi, Teori Klasik, Administrasi Publik Modern

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Teori organisasi klasik, yang umumnya dikenal sebagai teori manajemen abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ide-ide ini berbeda dengan gaya pemikiran hubungan manusia yang populer pada tahun 1930an dan 1940an. Fokus akhir makalah ini adalah pada pelajaran yang dapat diambil dari kerangka teoritis awal untuk administrasi publik kontemporer, berbagai proses, pendekatan, dan kegiatan pemerintahan dan politik yang dikenal sebagai "administrasi publik." Administrasi publik secara sederhana didefinisikan sebagai semua proses, organisasi, dan individu yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan lain yang diadopsi atau dikeluarkan oleh badan legislatif, pengadilan, dan eksekutif politik (Gordon, 1978).

Tentu saja, tujuannya bukan untuk membahas semua topik yang ada di bidang administrasi publik. Hal ini karena bidang tersebut sangat eklektik dan tidak mungkin untuk dilakukan. Makalah ini hanya membahas topik dan pendekatan utama. Untuk membedakan antara studi dan praktik administrasi publik, upaya dilakukan. Sebagian besar, penelitian tentang administrasi publik dimulai pada akhir tahun 1800-an.

Administrasi publik dianggap berbeda dan terpisah dari politik dari sekitar tahun 1887 hingga awal tahun 1920-an. Karya Woodrow Wilson (1887) dan Frank Goodnow (1900) adalah awal dari konsep dikotomi antara politik dan administrasi. Wilson (1887) menyatakan bahwa masalah administratif tidak selalu merupakan masalah politik. Dia menulis, mengatakan:

“Administrasi adalah bisnis. Ia tidak terpengaruh oleh ketidaksepakatan politik dan perselisihan; dalam banyak hal, ini berbeda dengan dasar studi konstitusi yang masih diperdebatkan”
(Wilson, 1887:209-210).

Perspektif Wilson tentang pemerintahan yang netral dan bebas dari politik dan perumusan kebijakan membentuk dasar pemikirannya. Ia mendorong pengembangan ilmu administrasi dalam upaya untuk membuat administrasi menjadi lebih profesional dan efektif. Tujuan dari ilmu administrasi ini adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang akan membantu administrator melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Politik dan Administrasi Goodnow, yang diterbitkan pada tahun 1900, adalah permintaan penuh semangat untuk memastikan bahwa partai politik bertindak adil dan responsif. Seperti Wilson, birokrasi harus mengawasi program legislatif secara objektif dan non-politik.

Kedua penulis tersebut menulis tentang masa reformasi Amerika yang bias terhadap tindakan politisi yang berlebihan. Sebagian besar alasan mereka untuk memisahkan politik

dari administrasi berasal dari kebutuhan untuk memberi pejabat administratif lebih banyak kebebasan untuk melakukan keputusan dan kekuasaan secara mandiri. Meskipun para ahli teori administrasi publik kemudian tidak setuju dengan dikotomi Wilson, paradigmanya tetap mendominasi pemikiran sebagian besar praktisi dan sarjana administrasi public, periode pemerintahan publik tradisional.

Selain secara konseptual membedakan masalah politik dari masalah administratif, banyak metode ilmiah yang disarankan selama periode ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi sektor publik dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang diambil dari sektor swasta. Saran ini sejalan dengan gagasan Wilson bahwa prinsip-prinsip bisnis dapat diterapkan pada sektor publik.

Tidak lama dahulu, penelitian tentang administrasi publik lebih cenderung menekankan hubungan antara politik dan administrasi daripada membedakan keduanya. Para ahli teori sistem menekankan bahwa semua komponen sistem politik saling berhubungan. Mereka mengakui bahwa badan legislatif tidak membuat semua keputusan. Ini sesuai dengan teori pembuatan kebijakan publik. Sebagian besar dibuat di gedung kantor administrasi, menurut mereka. Semua orang sekarang setuju bahwa keputusan yang dibuat oleh eksekutif politik biasanya terstruktur dan terkadang ditentukan oleh informasi yang dikumpulkan dan disebarluaskan oleh pejabat administratif.

Peralihan dari perbedaan antara politik dan administrasi adalah hasil dari kegelisahan akademis tentang perbedaan tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa cabang administratif pemerintahan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dan memberikan nasihat ahli kepada masyarakat. tanggung jawab politik untuk memfasilitasi proses membuat kebijakan (Gulick 1937).

Administrasi publik sebagai bidang akademis masih dalam proses menentukan identitasnya. Sebagian besar penulis berpendapat bahwa administrasi publik adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu, bukan suatu bidang tersendiri. Mereka mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, bidang ini banyak mengambil dari bidang lain, terutama sosiologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Terdapat perbedaan yang tidak jelas antara administrasi publik dan bidang lain, menurut Gordon. Menurut Gordon (1979), ada perdebatan tentang posisi intelektual dan institusional administrasi publik.

Di bidang administrasi publik, makalah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi risalah. Sebaliknya, ini hanyalah sebuah ulasan bidang ilmu, dan fokusnya adalah pada masalah yang sebagian besar membentuk gagasan administrasi publik kontemporer.

2. METODE

Metode yang digunakan yaitu metode *literature review*. Teknik tinjauan pustaka merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai Relevansi Teori Klasik dalam Konteks Administrasi Publik Modern. Tinjauan pustaka adalah teknik penelitian kualitatif yang melibatkan penggunaan berbagai sumber online, seperti buku, jurnal, dan artikel, sebagai bahan referensi topik penelitian (Marzali, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Teori Administrasi Publik Klasik dan Neo Klasik

Dalam bagian ini, kami akan membahas berbagai teori dari sudut pandang klasik dan neo-klasik.

3.1.1. Prinsip Administrasi

Aliran pemikiran lain yang berfokus pada "prinsip-prinsip administrasi" muncul saat Taylor berfokus pada proses administrasi. Karya insinyur pertambangan Perancis Henri Fayol adalah inspirasi bagi aliran pemikiran ini. Dalam karyanya, Fayol menjelaskan berbagai prinsip administrasi, termasuk pembagian kerja, kewenangan, disiplin, kesatuan komando dan pengarahan, subordinasi kepentingan pribadi pada kepentingan bersama, remunerasi, sentralisasi, rantai komando skalar, dan kepentingan Bersama, Keteraturan, kesetaraan, stabilitas kepemilikan, inisiatif, dan moral (Gulick, Luther, dan Urwick, L., 1937; Norman Cuthbert, 1970).

Prinsip Fayol, seperti Taylor, ditujukan untuk mencapai efisiensi. Dia berharap prinsip-prinsipnya akan digunakan sebagai pedoman umum untuk membantu administrator memahami lingkungan organisasi mereka. Ide Fayol diterima baik di Amerika Serikat dan Perancis. Dua anggota Komite Presiden Ilmu Administrasi yang didirikan oleh Roosevelt di Amerika Serikat mengakui kerja Fayol dan memasukkan tulisannya dalam risalah terkenal mereka yang berjudul *Papers on the Science of Administration* (Gulick dan Urwick, eds., 1937). Dalam penelitian ini, salah satu anggota Komite, Gulick, meminjam dari Fayol, menguraikan bagaimana manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan pengagungan.

Menurut penulis (1937) akronim terkenal ini menyampaikan perspektif administrasi yang telah memengaruhi pembelajaran dan pemikiran para ahli teori dan praktisi administrasi publik selama berbagai generasi. Herbert Simon (1946), salah satu kritikus terkenal dari prinsip-prinsip administrasi, menyatakan bahwa, seperti halnya peribahasa, prinsip-prinsipnya tidak jelas dan ambigu, dan mengandung istilah yang tidak didefinisikan dengan baik. Selain itu, dia membantah gagasan bahwa prinsip-prinsip tersebut bersifat ilmiah dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah hasil penelitian empiris yang bertujuan untuk menetapkan dasar bagi bagaimana organisasi berfungsi dengan baik.

3.1.2. Model Birokrasi Max Weber

Max Weber juga harus disebutkan dalam kaitannya dengan pendekatan "prinsip-prinsip administrasi". Weber terkait dengan pendekatan klasik karena ia mengambil posisi yang sama seperti yang diambil oleh sebagian besar penulis klasik mengenai hubungan yang tepat antara politisi dan administrator. Menurut pendapatnya, birokrat harus menjadi pelayan netral bagi para penguasa politiknya, ini merupakan posisi yang termasuk dalam pilihan klasik antara politik dan administrasi. Fokusnya adalah titik tolaknya. Berbeda dengan Taylor dan Fayol, yang berfokus pada proses, Weber berfokus pada struktur administrasi.

Dalam argumennya, Weber membedakan tiga jenis otoritas. Masyarakat tradisional memiliki penguasa yang menikmati otoritas pribadi berdasarkan kebiasaan. Hal ini didasarkan pada penghormatan terhadap yang kekal, kebenaran, dan kesesuaian dengan kebiasaan. Wewenang kepala suku adalah contohnya. Yang kedua adalah otoritas karismatik, di mana seorang pemimpin memperoleh kekuasaan berdasarkan sifat pribadinya. Percaya pada kekuatan magis, wahyu, atau kepahlawanan pemimpin, pengikut tunduk pada otoritas tersebut (Weber, 1947). Terakhir, ada otoritas hukum yang memungkinkan para pengikutnya mengakui kompetensi hukum orang yang berkuasa. Peraturan dan perundang-undangan menetapkan bahwa mereka yang memiliki wewenang bertindak sesuai dengan tugas mereka. Otoritas inilah yang mendasari gagasan Weber tentang birokrasi.

Dari rangkaian sifat yang lebih luas yang ditawarkan oleh Weber, enam sifat harus mendapat perhatian khusus:

- a. Hierarki wewenang: keputusan mengatur lokus pengambilan keputusan. Berbagai macam, masing-masing dibuat pada tingkat organisasi yang berbeda. Kantor yang

lebih tinggi mengawasi dan mengendalikan semua kantor yang lebih rendah. Dalam hierarki administrasi, setiap pejabat bertanggung jawab kepada atasannya terhadap bawahannya. Ini berarti bahwa mereka berhak mengeluarkan arahan yang berkaitan dengan cara dinas bekerja.

- b. Pembagian kerja: Pembagian kerja yang jelas hanya memungkinkan pekerjaan untuk ahli tertentu di posisi tertentu.
- c. Personalitas: Standar rasional harus mengatur operasi tanpa memperhatikan pikiran orang lain. Ketidakberpihakan dan efisiensi bergantung pada menghilangkan pertimbangan pribadi dari urusan resmi. Perspektif tidak memihak menghasilkan perlakuan yang adil bagi setiap pelanggan.
- d. Kualifikasi Teknis: Dalam organisasi birokrasi, pekerjaan didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan sewenang-wenang. Kinerja, kompetensi, dan kualifikasi teknis kandidat menentukan promosi dan penempatan.
- e. Spesifikasi Prosedural: Aturan dan regulasi yang jelas menentukan bagaimana anggota organisasi harus mengikuti metode yang ditentukan organisasi dalam berbagai situasi (Jackson 1982).
- f. Kontinuitas: Diharapkan bahwa anggota mengejar karir mereka di dalam organisasi. Kantor adalah pekerjaan bergaji penuh waktu dengan prospek kemajuan karir yang teratur (Beetham 1987).

Menurut Max Weber, ciri-ciri ini menggambarkan jenis organisasi ideal yang rasional dan efisien. Tujuannya jelas dan jelas. Dalam hierarki piramidal, jabatan diberi lebih banyak wewenang seiring dengan posisi seseorang dalam organisasi. Kesuksesan terletak pada jabatan, bukan pada individu yang memegangnya. Pemilihan anggota didasarkan pada kualifikasi mereka, bukan reputasi mereka. Senioritas dan kinerja menentukan promosi. Para pejabat yang bekerja dalam birokrasi memberikan pelayanan yang konsisten dan netral, yang sangat penting untuk keberhasilan negara.

Beberapa orang menentang model ini. Menurut banyak akademisi, penekanan Weber pada aspek formal organisasi mengabaikan struktur hubungan informal yang menjadi bagian dari operasi organisasi secara nyata. Ketika model difokuskan pada perilaku yang bergantung pada aturan, hal itu dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, seperti pergeseran tujuan ketika aturan menjadi tujuan itu sendiri. Parsons mempertimbangkan potensi konflik antara otoritas birokrat yang berasal dari keahlian teknis dan otoritas yang berasal dari posisi mereka dalam hierarki (Parsons 1960). Jika

hal-hal tidak sesuai, anggota organisasi yang lain tidak akan tahu siapa yang harus dipatuhi: yang berkuasa atau yang ahli. Gouldner (1959), menyadari bahwa gagasan birokrasi bebas nilai tidak masuk akal karena setiap orang membawa nilai-nilai mereka sendiri, yang pada gilirannya mempengaruhi birokrasi.

3.1.3. Teori Organisasi Neoklasik

Pendekatan neo-klasik adalah perluasan dari pendekatan manajemen klasik. Ini berasal dari pendekatan klasik, tetapi memperluas dan memperbaruinya (Sarker dkk., 2013). Sebaliknya, teori neo-klasik memasukkan elemen yang lebih manusiawi ke dalam ilmu manajemen dan organisasi. Ia berasal dari kendala teori klasik. Pendekatan neoklasik menekankan hubungan sosial atau manusia antara operator, peneliti, dan supervisor (Hersey dan Blanchard 1997). Ini didasarkan pada eksperimen Hawthorne. Tabel berikut menggambarkan karakteristik utama teori klasik dan neoklasik:

Tabel 1: Ciri-ciri Teori Klasik dan Neo-Klasik

Poin Perbedaan	Pendekatan Klasik	Pendekatan Neo-Klasik
Fokus Organisasi	Fungsi dan ekonomi permintaan pekerja	Emosi dan kualitas manusia pekerja
Struktur organisasi	Sistem Sosial yang impersonal dan mekanistik	
Aplikasi	Manajemen otokratis dan aturan yang ketat	Proses demokrasi
Tekanan	Disiplin dan rasionalitas	Keamanan pribadi dan tuntutan sosial
Tujuan kerja pekerja	Remunerasi maksimal dan hadiah	Pencapaian dari tujuan organisasi
Konsep tentang pekerja	Makhluk ekonomi	Makhluk sosial
Isi	Ilmiah manajemen, administrasi dan manajemen birokrasi.	Hawthorne eksperimen, gerakan hubungan manusia dan organisasi
Hubungan dalam organisasi	Resmi	tidak resmi
Sifat organisasi	Mekanis	Organik

Sumber: Sarker, Rafiul dan Khan , 2013

Dari tahun 1930 hingga 1950, para ahli teori hubungan manusia menentang anggapan para ahli teori klasik. Salah satu hal yang menyatukan para ahli teori ini adalah kebencian mereka terhadap pendekatan rekayasa manusia yang menyimpang dari kerangka manajemen ilmiah dan mengakibatkan kehancurannya dipekerjakan. Beberapa

orang juga tidak menyukai gagasan Weberian tentang hierarki dan upayanya untuk mencapai efisiensi tanpa mempertimbangkan bagaimana persyaratan efisiensi mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan seseorang.

Karya Argyris (1960), Herzberg (1964), Likert (1967), Maslow (1943), McGregor (1960), dan Vroom (1964) menunjukkan aliran hubungan manusia yang dibangun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayo (1933), Roethlisberger, dan Dickson (1939). Karena pekerjaan mereka, para ahli teori ini telah menunjukkan kekurangan penulis klasik. Kaum klasik berfokus pada insentif ekonomi, tetapi mengabaikan komponen penting lainnya yang memengaruhi perilaku individu non-ekonomi.

Serangkaian penelitian yang dilakukan di Hawthorne Works dari Western Electric Company di Chicago pada tahun 1927, bekerja sama dengan Universitas Harvard, menumbuhkan aliran hubungan manusia. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa aktor sosial dan kelompok sangat penting dalam mempengaruhi perilaku kerja individu. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor non-keuangan seperti kondisi kerja yang lebih bahagia, sikap mental, dan dinamika kelompok, semuanya cenderung mempengaruhi produktivitas karyawan. (Elton Mayo, 1933)

Hasil dari eksperimen Hawthorne membuka pintu ke dunia manajemen yang baru. Sehubungan dengan fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial, telah ditunjukkan bahwa memperlakukan karyawan sebagai individu yang memiliki tanggung jawab dibandingkan dengan memperlakukan mereka hanya sebagai bagian dari mesin. Pentingnya kebutuhan sosial akhirnya ditekankan oleh penelitian tambahan. Mengembalikan manusia ke dalam organisasi tak berdarah yang dibahas oleh Weber dan para ahli teori administrasi klasik adalah bagian dari pendekatan hubungan manusia, seperti yang ditunjukkan dengan tepat oleh Jackson (1982).

Di lokasi ini, mungkin diperlukan peringatan. Meskipun saya telah mengacu pada perkembangan logis dan korelasi ide, seringkali sulit untuk menarik hubungan sebab akibat di antara ide-ide tersebut. Tujuan dari manajemen ilmiah Taylor adalah untuk menemukan prinsip-prinsip dasar gerak yang terlibat dalam melakukan tugas fisik dan kemudian menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas apa pun. Studi waktu dan gerak adalah alat utama dalam upaya ini. Meskipun analisisnya sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta, banyak peminat di sektor publik menarik manajemen ilmiah. Salah

satu upaya pertama untuk menganalisis metode kerja secara menyeluruh dan memperkirakan bagaimana manajemen mempengaruhi produktivitas adalah manajemen ilmiah. Teori ini memiliki pengaruh yang terukur pada evolusi teori manajemen dan organisasi selanjutnya, meskipun tidak lagi dianggap sebagai teori yang komprehensif.

Gerakan manajemen ilmiah dilengkapi dengan pendekatan "prinsip-prinsip administrasi". Fokus manajemen ilmiah adalah pelaksanaan tugas fisik, sedangkan pendekatan "prinsip-prinsip administrasi" adalah struktur organisasi formal. Akibatnya, meskipun alat dasar analisis manajemen ilmiah adalah studi waktu dan gerak, pendekatan "prinsip-prinsip administrasi" adalah bagan organisasi formal. Identifikasi pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan pengelompokan dan koordinasi pekerjaan tersebut sedemikian rupa sehingga efisiensi organisasi dapat dimaksimalkan adalah masalah umum yang dibahas oleh para ahli teori "prinsip administrasi". Mereka berusaha untuk menciptakan "ilmu administrasi" yang sama berlaku baik di sektor pemerintah maupun swasta. Tidak diragukan lagi, analisis mereka tidak sistematis Manajemen Ilmiah. Prinsip-prinsip umum yang telah ditentukan sebelumnya dimaksudkan untuk diterapkan secara khusus, bukannya mengandalkan generalisasi yang dibangun secara induktif dari akumulasi observasi tertentu, seperti yang dilakukan manajemen ilmiah.

Teori birokrasi ideal Weber sangat mirip dengan jenis organisasi klasik yang jelas. Dia memilih jenis organisasi di mana otoritas didistribusikan secara hierarkis. Pada umumnya, otoritas formal berada di puncak organisasi hierarkis. Ini pada dasarnya adalah perspektif yang dianut oleh sebagian besar penulis klasik. Pendekatan hubungan manusia bertujuan untuk mengubah struktur organisasi yang sangat dianut oleh para penulis klasik. Perubahan besar dalam penelitian tentang organisasi ditunjukkan oleh perhatian yang lebih besar terhadap sikap dan perasaan karyawan serta kesadaran bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kelompok sosial. Pendekatan hubungan manusia berfokus pada aspek sosial dan psikologis perilaku organisasi, menjangkau kebutuhan manusia yang lebih luas yang dianggap penting untuk mendorong karyawan organisasi.

Pendekatan neo-klasik menganggap organisasi sebagai sistem sosial yang dipengaruhi oleh perasaan dan pola budaya individu yang berpartisipasi dalamnya. Diakui juga bahwa dinamika kelompok, kepemimpinan, motivasi, partisipasi, dan lingkungan kerja adalah faktor penting. Metode ini mengubah keyakinan bahwa karyawan hanyalah alat dan membangun keyakinan bahwa mereka adalah sumber daya

yang berharga. Ringkasnya, berbagai aliran pemikiran telah berubah dalam berbagai cara, dan banyak di antaranya sekarang ada dalam teori dan praktik administrasi publik. Komponen kemanusiaan organisasi kurang diperhatikan oleh para ahli teori klasik. Meskipun mereka menyadari bahwa kepemimpinan, inisiatif, kebajikan, kesetaraan, esprit de corps, dan keselarasan antara aspek manusia dan teknis diperlukan dalam pekerjaan, fokus utama mereka adalah memastikan bahwa karyawan yang mereka rekrut akan "sesuai dengan persyaratan organisasi mekanis" (Morgan 1998:39). Organisasi swasta dan publik jelas menunjukkan ciri-ciri dari berbagai teori organisasi yang dibahas sebelumnya.

3.2. Administrasi Publik Modern

Administrasi publik adalah bidang ilmu yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 karena revolusi industri, kemajuan ekonomi, dan pembentukan negara modern. Berdasarkan model klasik administrasi publik, administrasi publik memiliki banyak karakteristik. Ini termasuk penghormatan terhadap supremasi hukum, pemisahan ketat antara administrasi dan politik, dan pelayanan publik yang baik. Model ini juga beroperasi berdasarkan prinsip anonimitas dan netralitas politik.

Pemerintah dianggap sebagai lembaga utama yang bertugas menjaga kepentingan umum. Struktur kekuasaan hierarkis dan vertikal. Peraturan yang jelas mengatur pelayanan publik dan pejabat terpilih bertanggung jawab atasnya. Pegawai negeri diharapkan hanya memberikan arahan penyediaan fasilitas.

Teori-teori ini memberikan dimensi yang sangat penting yang membentuk negara modern dan modus operandinya. Supremasi hukum, dualisme, kewarganegaraan, kepentingan publik, dan peran pemerintah adalah masalah yang berasal dari kerangka tersebut, yang akan menjadi subjek diskusi selanjutnya.

3.2.1. Aturan Hukum

Konsep negara hukum adalah dasar dari berbagai teori yang dibahas. Dalam masyarakat mana pun yang rasional, supremasi hukum adalah dasar dari semua keputusan pemerintahan. Dalam skenario ini, undang-undang tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Artinya, dalam masyarakat yang beraturan, diharapkan bahwa semua warga negara menerima perlakuan hukum yang sama, dan tidak ada seorang pun yang dilindungi dari hukum. Dengan cara yang sama, birokrasi publik diharapkan dapat melaksanakan kebijakan dan keputusan administratif secara adil dan tidak memihak dengan berpedoman pada berbagai undang-undang administrasi publik yang dilindungi

oleh supremasi hukum. Meskipun diakui secara luas, asumsi logis ini berbeda-beda dalam konteks berbagai negara dan masyarakat.

Pertimbangan pribadi dan tekanan politik semakin memengaruhi administrasi publik, dan penerapan aturan dan regulasi yang ketat berdasarkan keutamaan ketidakberpihakan dan supremasi hukum mungkin tidak selalu menjadi norma di beberapa negara. Di beberapa negara, tampaknya ada kecenderungan patrimonial yang kuat yang mengancam supremasi hukum yang adil dan kemampuan lembaga publik untuk bekerja secara profesional tanpa hambatan (Bakker, JI 1988).

3.2.2. Dualisme

Saat ini, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan realitas abad ke-21 karena beberapa fitur administrasi publik klasik. Metode yang berbeda diperlukan untuk waktu yang berbeda. Permasalahan praktis yang kompleks dan realitas abad ke-21 harus dipertimbangkan saat membangun praktik masa lalu. Teori klasik administrasi publik mencerminkan perspektif dualis yang mendominasi abad ke-20. Pandangan ini akan melihat masalah dari kedua sisi publik dan privat. Dalam keadaan seperti ini, kepentingan swasta akan ditinggalkan kepada pasar dan keputusan yang dibuat oleh individu (Bourgon 2011:10).

Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan dan merasionalisasi penggunaan sumber daya publik secara adil dan merata ketika masalah tersebut bersifat publik dan dianggap berada dalam ranah publik. Akibatnya, kinerja publik dan efisiensi sebagai pedoman administrasi diharapkan dicapai melalui mekanisme dan aturan administrasi yang dilindungi oleh supremasi hukum. Sebagian besar masalah saat ini berhubungan dengan kepentingan swasta, publik, dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan sebagian besar masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari, diperlukan perspektif multifaset dan pendekatan multifaset.

Lihat dunia melalui peta mental dualistik yang tertanam dalam model administrasi publik abad ke-20. Ini ditunjukkan oleh perbedaan konvensional antara administrasi dan politik, serta antara pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan politik seperti mengurangi kemiskinan, mengurangi defisit anggaran, atau meningkatkan sistem kesehatan, diperlukan banyak kerja sama dan kolaborasi antara sektor swasta dan publik.

Teori klasik administrasi publik telah menginternalisasi dan melembagakan perspektif dualisme tentang dunia, yang ditunjukkan oleh berbagai perbedaan antara

fakta dan nilai, cara dan tujuan, pemikiran dan tindakan, dan sebagainya membuat keputusan dan menerapkan kebijakan (Svara 2001). Pemerintah saat ini menghadapi beberapa masalah paling kompleks dan rumit di zaman kita.

3.2.3. Kewarganegaraan

Sejak akhir abad ke-20, gagasan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum menjadi populer dalam diskusi administrasi publik. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Undang-undang memberikan hak dan kewajiban kepada setiap warga negara. Di antara hak-hak ini adalah hak untuk memilih dan memilih mereka yang mewakili kepentingan warga negara dan mengambil keputusan atas nama mereka.

Dalam banyak hal, teori dasar administrasi publik "mengecilkan" kontribusi warga negara (Ostrom 2000). Hal ini meremehkan peran yang dimainkan oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam menghasilkan hasil publik dan membangun masyarakat yang layak. Kewarganegaraan sekarang dianggap sebagai konsep yang lebih luas dan memiliki definisi dan makna yang lebih luas (Denhardt dan Denhardt 2003). Masyarakat adalah anggota keluarga, negara, dan komunitas. Mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih komunitas yang mereka sukai di mana pun mereka berada (Dagger 1997). Konsep warga negara global telah menjadi norma di dunia modern yang terhubung. Politik partisipasi, di mana individu berpartisipasi dalam komunitas untuk mencapai hasil yang ditetapkan, semakin terkait dengan politik kewarganegaraan (Pranger 1968).

3.2.4. Kepentingan Umum

Kepentingan publik ditentukan oleh otoritas politik, menurut teori klasik administrasi publik. Melaksanakan kemauan politik sama dengan membuat keputusan mereka (Bourgon 2011). Dalam hal ini, warga negara tidak berpartisipasi secara langsung dalam memilih wakil mereka atau memberikan legitimasi kepada kekuatan politik. Saat ini, kepentingan publik dapat didefinisikan sebagai upaya kolektif yang melibatkan pemerintah dan berbagai pihak lain. Di dunia di mana kekuasaan dan wewenang tersebar luas, pemerintah mencapai hasil, yang melibatkan masyarakat sipil, warga negara, sektor publik, dan sektor swasta (Stone 1997). Semakin jelas bahwa tidak ada pemerintah yang dapat mengontrol seluruh kekuatan negara.

Salah satu karakteristik administrasi publik abad ke-21 adalah koordinasi operasi besar yang melampaui kendali pemerintah (Bourgon 2011). Penyebaran pendekatan pemberian layanan non-tradisional, non-hierarki, dan non-pemerintah telah menjadi topik utama dalam reformasi sektor publik selama tiga puluh tahun terakhir (Kettl 2000). Pelayanan publik saat ini semakin tidak langsung, tidak berwujud, dan kompleks. Akibatnya, beberapa Untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat, diperlukan tindakan yang direncanakan dengan cermat dan mendapatkan dukungan dari rata-rata warga (Bourgon 2011).

3.2.5. Peran Pemerintah

Pemerintah dilihat oleh teori klasik administrasi publik sebagai penyedia utama pelayanan publik. Ini tidak lagi sesuai dengan fungsi yang seharusnya dimainkan oleh sebagian besar pemerintah di abad kedua puluh satu. Saat ini, tugas pemerintah adalah menggabungkan partisipasi pemerintah, masyarakat, dan masyarakat ke dalam sistem pemerintahan bersama yang fleksibel. Pemerintah harus berkembang bersama masyarakat (Rotmans et al., 2001).

4. SIMPULAN

Teori klasik administrasi publik yang berasal dari abad ke-20 memberikan fondasi yang kuat untuk administrasi publik modern. Teori-teori ini mencakup prinsip supremasi hukum, komitmen terhadap proses hukum dalam melayani kepentingan publik, kepedulian terhadap efisiensi penyediaan layanan, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Ini meletakkan dasar bagi sistem akuntabilitas yang kuat di setiap tingkat administrasi publik. Sistem administrasi publik yang dibangun berdasarkan kerangka teoritis klasik ini telah terbukti sangat stabil dalam berbagai situasi di seluruh dunia. Tidak mampu menyesuaikan diri, organisasi publik yang berasal dari abad ke-20. Mereka dirancang untuk menyediakan layanan publik dalam jumlah besar dan mencapai tujuan tertentu. Mereka tidak diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dengan keadaan, dan karena itu mereka tidak siap untuk berinovasi atau menemukan cara baru untuk memenuhi misi mereka. Untuk menghindari jebakan yang terkait dengan kecenderungan alami untuk perubahan, organisasi sektor publik harus menyesuaikan sistem internal mereka untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan yang semakin meningkat, yang mencakup masalah politik, teknologi, sosial, dan ekonomi. menolak transformasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Argyris, C. 1960. *Understanding Organisational Behaviour*. Dorsey Hoomewood: Illinois.
- Bakker, J. I. (Hans). 1988. "Patrimonialism, Involution and the Agrarian Question in Java: A Weberian Analysis of Class Relations and Servile Labor".
Chap. 16, pg. 279-301 in Gledhill, John (ed.) *State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralisation*. London: Unwin Hyman, Ltd.
- Bourgon, J. 2011. *A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21st Century*. Canada: McGill-Queens University Press.
- Bourgon, J. 2008. *The Future of Public Service A Search for a New Balance*. *Australian Journal of Public Administration*, 67, No.4, pp: 390-404.
- Copley, Frank Barkley. 1993. *Frederick W. Taylor: Father of Scientific Management*, Routledge/Thoemmes Press.
- Dagger, R. 1997. *Civic Virtues: Rights, Citizenship and Republican Liberalism*. New York: Oxford University Press.
- Denhardt, J.V. and Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E Sharpe.
- Fayol, Henri.1949. *General and Industrial Management*. (Translated by C. Storrs), London: Pitman.
- Goodnow, F.J. 1900. *Politics and Administration :A Study in Government*. New York: Russell and Russell, pp: 17-26.
- Gordon, G.J.1978. *Public Administration in America*. New York: St. Martins Press.
- Gouldner, A. W. (1959). "Organizational Analysis." in *Sociology Today*. edited by R. K. Merton, L.
- Broom and L. S. J. Cottrell. New York: Basic Books, 400-428.
- Gulick, Luther. and Urwick, L. eds. 1937. *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Public Administration.
- Gulick Luther, 1965. 'The Twenty-Fifth Anniversary of the American Society for Public Administration,' *Public Administration Review* 25,1.
- Hersey, P and Blanchard, K. 1977. *Management of Organisational Behaviour*. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Herzberg, F. 1964. *The Motivation-Hygiene Concept*. *Personnel Administration*, January-February.
- Jackson, P.M. 1982. *The Political Economy of Bureaucracy*. Oxford: Philip Allan Publishers Ltd.
- Kettl, D.F. 2000. *The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance*. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- Likert, R. 1967. *The Human Organisation*. McGraw-Hill.
- Maslow, A. A. 1943. *A Theory of Motivation*. *Psychological Review*, 50 (4):370:96.
- Mayo, E. 1933. *The Human Problems of an Industrial Civilization*. New York: Viking.

- Morgan, G. 1998. *Images of Organisation: The Executive Edition*. London: Sage Publications.
- McGregor, D.M. 1960. *The Human Side of Enterprise*. New York: McGraw-Hill.
- Norman, Cuthbert. 1970. Fayol and the Principles of Organizations, In Anthony Tillet et al., eds, *Management Thinkers* (Harmondsworth, Middlesex, Penguin, :108-39.
- Parsons, T. 1960. *Structure and Process in Modern Societies*. Illinois: Free Press.
- Pranger, R.J. 1968. *The Eclipse of Citizenship: Power and Participation in Contemporary Politics*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Roethlisberger, F. and Dickson, W. 1939. *Management and the Worker*. John Wiley.
- Rose, R. 1974. *The Problems of Party Government*. London: Macmillan.
- Rose, Michael. 1975. *Industrial Behaviour: Theoretical Development Since Taylor*, London: Allen Lane.
- Rotmans, J., Rene, K. and Marjolein, A. 2001. More Evolution than Revolution: Transition Management in Public Policy. *The Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy* 3 (1), 15-31.
- Sarker S.I., Rafiul, M. and Khan, A. 2013. Classical and Neoclassical Approaches of Management: An Overview. *Journal of Business and Management*, 14 (6), 1-5.
- Simon, Herbert. A. 1946. The Proverbs of administration. *Public Administration Review*, 6 (1), 53-67.
- Stone, D. 1997. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. New York: W.W. Norton.
- Svara, J. H. 2001. The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration. *Public Administration Review* , 61, (2), 176-83.
- Taylor, Frederick W. 1911. *The Principles of Scientific Management* .New York: Harper Bros., 5-29 Taylor, Frederick W. 1947 . *Principles of Scientific Management*. New York, Harper and Row.
- Vroom, V.H. 1964. *Work and Motivation*. New York: McGraw-Hill. Weber, M. 1947. *The Theory of Social and Economic Organisation*. London: Oxford University Press.
- Wilson, Woodrow. 1887. The Study of Administration. *Political Science Quarterly* 2, (2), 197-222.